



## **PENGUMUMAN**

Nomor : 1/-077.92

Tentang

### **Pengadaan Jasa Konsultasi Perorangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023**

Berdasarkan Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) UPT Pusat Riset dan Inovasi Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor : 17/PN.01.02 Tanggal 6 Januari 2023 perihal Permohonan Proses Pengadaan Barang/Jasa, dengan ini diberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia (WNI) untuk mengikuti seleksi dengan formasi kebutuhan Tenaga Ahli:

a. Tenaga Ahli Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan sebanyak 1 (satu) orang.

#### **I. PERSYARATAN KUALIFIKASI ADMINISTRASI/LEGALITAS MELIPUTI:**

- a. Surat Lamaran yang ditujukan kepada Pejabat Pengadaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- b. Surat Pernyataan Pakta Integritas;
- c. Formulir Isian Kualifikasi;
- d. Foto Copy Identitas Kewarganegaraan Indonesia seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor/Surat Keterangan Domisili Tinggal;
- e. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- f. Surat pernyataan yang ditandatangani Peserta yang berisi:
  1. Tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam;
  2. Keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait;
  3. Tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau sedang menjalani sanksi pidana; dan

4. Tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan Negara.
  5. Bersedia ditempatkan di Wilayah Provinsi DKI Jakarta;
  6. Tidak menuntut apabila anggaran tidak tersedia dan terdapat perubahan anggaran dalam DPA-Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022 atau proses pengadaan langsung dibatalkan;
  7. Tidak Menuntut untuk diangkat sebagai CPNS dan/atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK); dan
  8. Menjaga seluruh data dan informasi yang diberikan oleh Pemprov DKI dan tidak boleh dipergunakan untuk keperluan apapun tanpa persetujuan tertulis Bappeda Provinsi DKI Jakarta.
- g. Foto Copy Ijazah yang sesuai dengan syarat kualifikasi;
  - h. Foto berwarna ukuran 4x6;
  - i. Daftar Riwayat Hidup/Curriculum Vitae (CV);

## **II. PERSYARATAN KUALIFIKASI TEKNIS MELIPUTI:**

### **a. Pendidikan**

1. Tenaga Ahli Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan minimal S1 Jurusan/Program Studi Ilmu Hukum/Ilmu Pemerintahan/Ilmu Politik/Ilmu Ekonomi/Ilmu Ekonomi Islam/Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan pada Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta atau lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri yang terdaftar dan diakui oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan RI.

### **b. Pengalaman Pekerjaan**

1. Tenaga Ahli Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
  - a) Memiliki pengalaman bekerja minimum 3 (tiga) tahun di Lembaga Penelitian, Instansi Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Lembaga Nasional atau Instansi lainnya;
  - b) Pernah terlibat dalam penelitian maupun dalam penyusunan jurnal ilmiah;
  - c) Berpikir komprehensif dan merancang suatu konsep multisektoral termasuk pemahaman terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) baik dalam konteks global maupun nasional;
  - d) Cakap dalam Bahasa Inggris (ditunjukkan dengan skor TOEFL yang masih berlaku dengan minimal skor TOEFL adalah 500 yang diterbitkan dari lembaga internasional atau lembaga bahasa perguruan tinggi atau lembaga pendidikan Bahasa Inggris.

### III. TATA CARA PENDAFTARAN

Pendaftaran dapat dilakukan dengan mengirimkan data lamaran sesuai dengan Persyaratan Administrasi/Kualifikasi ke email [rekrutmen.pipp@gmail.com](mailto:rekrutmen.pipp@gmail.com) mulai tanggal 9 - 15 Januari 2023 Up. Pejabat Pengadaan Barang Jasa pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

### IV. JADWAL SELEKSI

Seluruh tahapan seleksi akan dilakukan di Jakarta, penjadwalan untuk seluruh tahapan seleksi adalah sebagai berikut:

1. Pengumuman Pengadaan	9 Januari 2023
2. Pendaftaran	9 - 15 Januari 2023
3. Seleksi Administrasi	16 Januari 2023
4. Pengumuman Seleksi Administrasi	17 Januari 2023
5. Seleksi Tertulis dan Interview	19 - 20 Januari 2023
6. Pengumuman Seleksi Tertulis dan Teknis	23 Januari 2023

### V. LAIN-LAIN

1. Pelamar yang dinyatakan lulus setiap tahapan seleksi, maka berhak mengikuti tahapan seleksi selanjutnya;
2. Bagi Pelamar yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan Gugur;
3. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir diketahui terdapat keterangan Pelamar yang tidak sesuai/tidak benar, maka Pejabat Pengadaan dan Tim Teknis Seleksi dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan;
4. Keputusan Pejabat Pengadaan dan Tim Teknis Seleksi tidak dapat diganggu gugat.

Jakarta, 9 Januari 2023  
Pejabat Pengadaan  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta



Ahnafian Hafidh  
NIP 199611022019031007

## FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

No. Identitas :

Alamat :

Telepon/fax :

Email :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Saya secara hukum mempunyai kapasitas untuk menandatangani Kontrak;
2. Saya bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah;
3. Saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
4. Saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
5. Saya tidak sedang dikenakan sanksi Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
6. Data-data yang saya sampaikan adalah sebagai berikut:

### A. Data Administrasi

1.	Nama	:	
2.	Pekerjaan	:	
3.	Alamat Rumah	:	
	No. Telepon	:	
	No. Fax	:	-
4.	Alamat Kantor	:	
	No. Telepon	:	
	No. Fax	:	
	E-Mail	:	-
5.	Nomor Identitas (KTP/SIM/Paspor)	:	

### B. Izin Lainnya [apabila dipersyaratkan]

1.	Izin _____	:	No_____Tanggal _____
2.	Masa berlaku izin	:	_____
3.	Instansi pemberi izin	:	_____

### C. Data Keuangan Pajak

1.	Nomor Pokok Wajib Pajak	:	
2.	Bukti laporan Pajak tahun terakhir	:	





Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(Tempat, tanggal)  
Penyedia

(Nama)

## PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

No. Identitas :

Alamat :

Pekerjaan :

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dalam rangka pengadaan penyedia jasa lainnya perorangan belanja jasa Tenaga Ahli Sosial dan Kependudukan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022 dengan ini menyatakan:

1. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini;
3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan professional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1, 2, dan 3 maka bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(Tempat, tanggal)

(Nama)

## **SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

No. Identitas :

Alamat :

Pekerjaan :

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dalam rangka pengadaan penyedia jasa lainnya perorangan belanja jasa Tenaga Ahli Sosial dan Kependudukan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022 dengan ini menyatakan:

1. Tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam;
2. Keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait;
3. Tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau sedang menjalani sanksi pidana;
4. Tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan Negara;
5. Tidak melaksanakan jasa tenaga ahli lain pada waktu yang bersamaan;
6. Bersedia ditempatkan di Wilayah Provinsi DKI Jakarta;
7. Tidak menuntut apabila anggaran tidak tersedia dan terdapat perubahan anggaran dalam DPA-Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022 atau proses pengadaan langsung dibatalkan;
8. Tidak menuntut untuk diangkat sebagai CPNS dan/atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK); dan
9. Menjaga seluruh data dan informasi yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan tidak boleh dipergunakan untuk keperluan apapun tanpa persetujuan tertulis Bappeda Provinsi DKI Jakarta.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

(Tempat, tanggal)

(Nama)